

UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Fitri Darmatasia¹ Bambang Irawan², Fajar Apriani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pengembangan pariwisata, serta untuk menganalisis kontribusi sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu Pengembangan Pariwisata yang meliputi : destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, komunikasi informasi dan media massa, sumberdaya pengelola pariwisata, infrastruktur serta kontribusi penerimaan sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 3 tahun terakhir. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas yaitu Kepala Dinas sebagai key informan, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai informan serta masyarakat yang melakukan kunjungan wisata pada obyek wisata di Kabupaten Bulungan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Upaya pengembangan Pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki program pengembangan wisata yang rinci karena keterbatasan anggaran yang tersedia dalam upaya pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan berbagai upaya promosi terhadap obyek wisata malalui berbagai media komunikasi informasi, meningkatkan SDM serta melakukan pengembangan terhadap infrastruktur secara bertahap terhadap destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang jelas mengenai retribusi obyek wisata sehingga obyek wisata belum dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar obyek wisata. Kontribusi penerimaan sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Dinas

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: indrykhalistanur@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Kebudayaan dan Pariwisata terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bulungan belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD dikarenakan beberapa obyek wisata belum sepenuhnya dikelola dan dilakukan retribusi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan dari sektor pariwisata mengalami kenaikan dari total PAD pada tahun 2013-2016 melalui Pajak Hotel, Pajak Resto, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame sebesar 0,14% s/d 9,49% dari kontribusi pajak yang dikelola Dinas Pariwisata. Namun pada tahun 2017 kontribusi PAD hanya 3,16% menurun dari tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata

Pendahuluan

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari arah pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia. Dengan kata lain, dalam keadaan nasional itulah terletak landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI menyatakan sebagai visinya bahwa pembangunan kebudayaan bangsa, meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa, serta meningkatkan persahabatan antarnegara.

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara disektor non migas. Walaupun penghasilan seringkali dikaitkan dengan jumlah wisatawan mancanegara, karena menghasilkan devisa, namun wisatawan nusantara sangat mempengaruhi kegiatan kepariwisataan, termasuk hotel, restoran maupun industri cinderamata, pengembangan obyek wisata juga merupakan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah. Penugasan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga merupakan penugasan dalam lingkup kewenangan pemerintah. Pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan didanai oleh pemerintah. Pendanaan oleh pemerintah ini disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar besaran dana yang dialokasikan harus menjamin terlaksananya penugasan yang diberikan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksudkan diatas merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan dorongan dan perhatian

yang besar dari pemerintah diharapkan dapat menjaring wisatawan sebanyak-banyaknya, baik wisatawan dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menyaksikan obyek wisata yang ada di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan, antara lain :

1. Kualitas jalan menuju obyek-obyek wisata di daerah yang jauh dari kota belum memadai.
2. Minimnya sarana akomodasi dan pelayanan kebutuhan wisatawan di obyek-obyek wisata.
3. Pengelolaan obyek wisata yang belum profesional.
4. Minimnya sarana promosi.
5. Rendahnya sadar wisata masyarakat di sekitar obyek wisata.
6. Fasilitas pendukung di obyek-obyek wisata belum tersedia.
7. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata, hal ini diakui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu kendala dalam penanganan obyek wisata seperti Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas (dikutip dari Bulungan Post, 31 Oktober 2016).

Faktor yang mempengaruhi kurang diminatinya obyek wisata di Kabupaten Bulungan ini dikarenakan obyek wisata yang tidak terawat serta lingkungan obyek wisata yang kotor akan sampah-sampah. Bukan hanya itu, sepiinya kunjungan para wisatawan disebabkan kurangnya promosi dan fasilitas pendukung yang juga belum tersedia. Seperti kurangnya fasilitas penginapan, dan restoran, bahkan fasilitas infrastruktur jalan menuju obyek wisata juga kurang memadai. Pengemasan obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulungan belum tertata dengan baik, kurang menarik dan pengelolaannya tidak kreatif membuat wisatawan kurang begitu tertarik untuk mengunjungi obyek wisata tersebut. Sarana aksesibilitas untuk menuju obyek wisata kurang tersedia, misalnya angkutan umum yang menuju lokasi obyek wisata dan kondisi jalan menuju obyek wisata masih sempit, kurangnya promosi, pemasaran yang dilakukan masih bersifat lokal, dan belum adanya hubungan kerjasama antar pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?
2. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ?

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan Keuangan Daerah

Widjaja (2005 : 78) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti

bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Prakoso (2005 : 2) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah

Marpaung (2002 : 56) pengaruh langsung dan tidak langsung menembus pendapatan dalam batas wilayah pertambahan. Angka akan terus berlanjut dalam batas penjualan, pendapatan, penggunaan atau pembayaran. Kita telah melihat bahwa pengaruh dari uang wisatawan yang dilanjutkan lebih dari itu dalam pendapatan masyarakat akan meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat didefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam penerimaannya melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah yang telah disahkan sesuai Peraturan Pemerintah.

Pengembangan Pariwisata

Yoeti (2006 : 22) kegiatan pariwisata adalah salah satu ungkapan budaya. Mungkin tidak semua kebudayaan mempunyai konsep yang sama mengenai kegiatan berwisata. Bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak mengenalnya. Pariwisata sebagai sebuah upaya yang sengaja, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pengalaman khusus di tempat lain, diluar kawasan hunian si ‘wisatawan’, untuk kemudian kembali pulang, dan ini diatur dalam suatu industri jasa.

Pitana (2009 : 134) pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata termasuk prioritas alokasi anggaran tertinggi dan digariskan untuk menghasilkan banyak devisa, karena dengan bertambahnya devisa banyak diperlukan untuk menggiatkan pembangunan negara. Dengan demikian bahwa pengembangan pariwisata dengan segala aspeknya mempunyai pengaruh langsung terhadap pendapatan devisa negara dan peluasan kesempatan kerja. Hal ini sebagai akibat dari adanya pembinaan dan pemeliharaan terus-menerus dari pemerintah terhadap semua unsur budaya di daerah yang mempunyai potensi dalam menarik wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dalam penelitian ini Upaya Pengembangan Pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah upaya untuk mengembangkan daerah wisata berupa sumber daya alam yang mempunyai potensi wisata yang dilakukan secara bertahap dengan menetapkan program-program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, Peningkatan Sumberdaya Pengelola Pariwisata, dan Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Bulungan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2009:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata :
 - a) Destinasi Pariwisata
 - b) Pemasaran Pariwisata
 - c) Komunikasi Informasi dan Media Massa
 - d) Sumberdaya Pengelola Pariwisata
 - e) Infrastruktur
2. Kontribusi penerimaan sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 3 tahun terakhir.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang peroleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. *Key informan* adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. *Informan* adalah Kepala Bidang Pariwisata, serta masyarakat yang pernah mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Bulungan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yakni *Key Informan* dan *Informan* ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Tujuan dari pemilihan *Purposive Sampling* sumber-sumber informasi yang diinginkan peneliti benar-benar sesuai.

2. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu:
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan SDM melalui Diklat kepemimpinan di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat diperpustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
yaitu pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, teori dan konsep dari kepustakaan berupa buku-buku ilmiah dengan mempelajari bahan literatur yang terkait dengan judul ini.
2. Peneliti Lapangan (*Field Work Research*)
Pengumpulan data-data, informasi dan bahan secara langsung kelapangan lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan antara lain yaitu : Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi

Teknik analisis data sangat diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam analisis data kualitatif terdapat empat kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : pengumpulan data (*Data Collection*) kondensasi data (*Data Condensation*), penyajian data (*Data Display*), penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/verifying*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Pengembangan Pariwisata*

Pengembangan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dan wawancara terhadap *key informan* dan *informan* maka penulis menyimpulkan bahwa Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bulungan belum berjalan dengan baik namun masih terus dilakukan pengembangan terhadap obyek-obyek wisata yang ada.

a. *Destinasi Pariwisata*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa peran penting keberadaan SDM di industri pariwisata, yaitu sebagai motor penggerak kelangsungan industri, pelaku utama yang menciptakan produk inti pariwisata (pengalaman), dan salah satu faktor penentu daya saing industri. SDM Pariwisata Kabupaten Bulungan masih kurang, sehingga pengelolaan obyek

wisata tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan obyek wisata yang ada banyak terbengkalai dan tidak terawat.

Infrastruktur

Sebagai destinasi pariwisata yang mulai berkembang kearah lebih maju maka upaya pengembangan kepariwisataan memerlukan perencanaan yang cermat dan detail karena dalam dunia kepariwisataan menyangkut berbagai bidang sektor kehidupan, baik bagi pengunjung dalam hal ini adalah wisatawan asing atau lokal maupun bagi masyarakat setempat yang menjadi penyedia produk kepariwisataan dan sekaligus sebagai tuan rumah. Perencanaan kepariwisataa di suatu destinasi pariwisata tidak hanya merupakan kepentingan wisatawan tetapi juga harus melihat kepentingan masyarakat atau melibatkan masyarakat baik bersifat lokal, daerah dan nasional. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat diketahui bahwa destinasi pariwisata Kabupaten Bulungan saat ini cukup berpotensi hanya saja masih perlu dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang aktifitas pendukung seperti rambu-rambu peringatan bahaya yang masih belum ada.

b. *Pemasaran Pariwisata*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pemasaran obyek wisata nya masih kurang baik dari segi promosi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak pernah mendapatkan brosur/lefllet tetang pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan.

Pemasaran dalam bidang pariwisata sangat diperlukan, karena adanya pemasaran obyek wisata tersebut jadi dikenal masyarakat luas dan dapat menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan upaya untuk memasarkan dan mempromosikan obyek wisata. Pemasaran ataupun promosi obyek wisata pasti dilakukan. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah melakukan promosi obyek wisata baik melalui surat kabar maupun pameran-pameran yang diikuti. Namun karena keterbatasan masyarakat dalam mencari informasi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan brosur/lefllet tentang pariwisata di Kabupaten Bulungan.

c. *Komunikasi Informasi dan Media Massa*

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi informasi dan media massa yang ada masih terbatas, karena hanya di informasikan melalui surat kabar serta media sosial dan tidak di informasikan melalui radio maupun media lainnya. Namun masih terus melakukna pengembangan dalam informasi kepariwisataan.

Melakukan promosi melalui media massa merupakan cara gampang dan mudah untuk berpromosi, karena seluruh dunia dapat melihat dan menerima informasi tersebut. Oleh karena itu, kini teknologi sudah semakin maju dan

berkembang dalam melakukan aktivitas kepariwisataan yang dapat mendatangkan banyak wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Selain kebutuhan wisatawan akan informasi yang lengkap, akurat dan mudah di dapat, maka pihak lain yang juga membutuhkan data dan informasi tersebut adalah pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan dibidang pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa komunikasi informasi dan media massa sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan masih terbatas, karena hanya di informasikan melalui surat kabar serta media sosial dan tidak di informasikan melalui radio maupun media lainnya. Namun masih terus dilakukan pengembangan informasi kepariwisataan.

d. Sumberdaya Pengelola Pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa sumberdaya pada obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulungan sudah cukup baik namun masih harus terus dilakukan pemantauan oleh tenaga pengelola obyek wisata tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wisatawan.

SDM merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (*people*) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Demikian juga atraksi wisata di suatu daerah tujuan wisata, intinya merupakan faktor manusia yang akan menentukan apakah para pengunjung (wisatawan) akan memperoleh pengalaman total dan akan berkunjung kembali. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa peran penting keberadaan SDM di industri pariwisata, yaitu sebagai motor penggerak kelangsungan industri, pelaku utama yang menciptakan produk inti pariwisata (pengalaman), dan salah satu faktor penentu daya saing industri. SDM Pariwisata Kabupaten Bulungan masih kurang, sehingga pengelolaan obyek wisata tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan obyek wisata yang ada banyak terbengkalai dan tidak terawat.

e. Infrastruktur

Attraction dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi dibawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah sistem pengairan/air, sumber listrik dan energi, jaringan komunikasi, sistem pembuangan kotoran/pembuangan air, jasa-jasa kesehatan, serta jalan raya.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bulungan berupa akses jalan menuju daerah obyek wisata sudah memadai dan masih terus dilakukan pengembangan secara bertahap karena anggaran yang terbatas sehingga program harus menyesuaikan terutama dari segi kebersihan dalam pengelolaan obyek wisata yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya pemeliharaan prasarana dan sarana wisata di Kabupaten Bulungan adalah berkembangnya paradigma “*by project*” dalam pembangunan prasarana dan sarana. Hal ini menyebabkan segala kegiatan pengembangan prasarana sarana penunjang kepariwisataan tidak berkelanjutan, namun bersifat periodik dan berorientasi jangka pendek. Minimnya anggaran pemeliharaan mengakibatkan masa efektif penggunaan (umur pakai) prasarana dan sarana yang ada menjadi terlambat pendek. Upaya peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur penunjang wisata adalah dengan memperluas jaringan pelayanan infrastruktur dasar, seperti air bersih dan jaringan listrik yang masih hanya menjangkau kawasan permukiman masyarakat, sehingga juga dapat menjangkau kawasan wisata, serta melakukan perbaikan pada bangunan fasilitas umum yang telah rusak, seperti toilet, gazebo, bangku pengunjung dan lain-lain.

2. *Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata yang Dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Penrimaan PAD Kabupaten Bulungan*

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, setiap daerah akan selalu berusaha mengoptimalkan PAD melalui kebijakan yang efektif. Pemerintah Kabupaten Bulungan menetapkan target dan raelisasi penerimaan yang hendak dicapai untuk setiap komponen PAD baik pajak derah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun PAD yang sah.

Tabel 1
Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Realisasi
1	2013	91.405.543.171,83
2	2014	124.794.736.232,62
3	2015	114.561.457.696,79
4	2016	32.444.787.487,61
5	2017	44.658.686.061,46

Sumber : Data Dispenda Kalimantan Utara, 2017

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa jumlah penerimaan mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2013 penerimaan PAD tidak sebesar pada tahun 2014 dan 2015 bahkan pada tahun berikutnya yaitu 2016 realisasi PAD sangat rendah namun mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 41,64%. Untuk lebih rincinya, penulis sajikan rekap data total penerimaan PAD dari sektor Pariwisata sebagai berikut :

Tabel 2
Rekap Data Total Penerimaan dari Sektor Pariwisata
Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Resto	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Total
1	2013	235.558.105,70 (0,26%)	99.886.903,20 (0,11%)	13.530.000,00 (0,02%)	65.577.475,00 (0,08%)	414.552.483,90 (0,47%)
2	2014	491.439.672,60 (0,39%)	129.535.288,58 (0,11%)	12.875.675,00 (0,02%)	86.909.450,63 (0,07%)	720.760.086,81 (0,59%)
3	2015	489.435.392,90 (0,43%)	1.395.067.482,67 (1,22%)	25.786.400,00 (0,03%)	190.653.209,25 (0,17%)	2.100.942.484,82 (1,85%)
4	2016	671.744.357,50 (2,08%)	2.231.738.670,67 (6,88%)	15.829.100,00 (0,05%)	147.321.681,88 (0,46%)	3.066.633.810,05 (9,46%)
5	2017	254.139.550,90 (0,57%)	994.694.298,75 (2,23%)	8.720.100,00 (0,02%)	149.353.607,00 (0,34%)	1.406.907.556,65 (3,16%)

Sumber : Data Dispenda Kalimantan Utara, 2017

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan dari sektor pariwisata mengalami kenaikan dari total PAD pada tahun 2013-2016 yaitu sebesar 0,14% s/d 9,49% dari total kontribusi pajak yang dikelola Dinas Pariwisata. Namun pada tahun 2017 kontribusi PAD menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,16%.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan mengenai pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bulungan maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan obyek wisata belum berhasil meningkatkan PAD secara langsung. Kondisi ini terjadi karena belum adanya peraturan untuk menarik retribusi dari obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulungan. Hanya ada penerimaan dari sektor pariwisata yaitu Pajak Hotel, Pajak Resto, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan mengenai upaya pengembangan Pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pengembangan Pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki program pengembangan wisata yang rinci karena keterbatasan anggaran yang tersedia dalam upaya pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan berbagai upaya promosi terhadap obyek wisata malalui berbagai media komunikasi informasi, meningkatkan SDM serta melakukan pengembangan terhadap infrastruktur secara bertahap terhadap destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang jelas mengenai retribusi obyek wisata sehingga obyek wisata belum dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar obyek wisata.

2. Kontribusi penerimaan sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bulungan belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD dikarenakan beberapa obyek wisata belum sepenuhnya dikelola dan dilakukan retribusi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan dari sektor pariwisata mengalami kenaikan dari total PAD pada tahun 2013-2016 melalui Pajak Hotel, Pajak Resto, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame sebesar 0,14% s/d 9,49% dari kontribusi pajak yang dikelola Dinas Pariwisata. Namun pada tahun 2017 kontribusi PAD hanya 3,16% menurun dari tahun sebelumnya.

Saran

Minimnya anggaran dana yang disediakan pemerintah untuk pengelolaan obyek wisata mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata sehingga pengemasan obyek wisata yang ada belum tertata dengan baik serta kurang menarik dan tidak kreatif. Hal tersebut menjadi faktor kurang dimintainya obyek wisata di Kabupaten Bulungan sehingga belum menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Melihat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dalam upaya pengembangan pariwisata, maka adapun saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yakni sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, diharapkan dapat menyusun suatu kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan obyek wisata. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menetapkan regulasi terkait retribusi obyek wisata sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan juga diharapkan lebih memperhatikan dan membangun infrastruktur pada obyek wisata di Kabupaten Bulungan sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
2. Diharapkan bagi pemerintah, menyediakan sumberdaya-sumberdaya pengelola yang lebih baik dan sesuai dengan bidangnya serta menyediakan alokasi dana yang cukup agar pengembangan obyek wisata dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih berkembang.

3. Diharapkan pengelolaan dikelola dengan baik, semua faktor-faktor yang diperlukan pengunjung terpenuhi, tersedianya fasilitas-fasilitas umum seperti mushola, toilet, dan warung makan agar pengunjung merasa puas dengan kunjungan wisatanya.
4. Bagi masyarakat, diharapkan tetap menjaga partisipasi dalam meningkatkan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bulungan. Masyarakat dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman, bersih dan aman disekitar obyek wisata. Hal ini perlu dilakukan agar obyek wisata menjadi lebih menarik lagi bagi pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Pitana, I Gede. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. CV. Andi, Yogyakarta.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UUI Press, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Dokumen-dokumen :

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Jakarta.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nom